



# **RENCANA KERJA 2027**

**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2026**


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2027 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja SKPD Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut merupakan sebuah rancangan awal perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027.

Adapun dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berupaya untuk mewujudkan pencapaian Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Rencana Kerja SKPD Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan hasil yang akurat sehingga penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2027 ini dapat terselesaikan.

Pelaihari, Januari 2027  
Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan  
Hewan

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mursyi', written over a light gray rectangular background.

Ir. H. Muhammad Mursyi  
NIP. 19680304 199803 1 009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	17
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	17
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	19
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>20</b>
4.1 Program dan Kegiatan .....	
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAH**

## **ULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena menentukan arah pembangunan daerah ke depan, dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Salah satu kebijakan perencanaan daerah adalah Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Rancangan Teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut mengacu pasal 27 dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD memiliki peranan penting dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan/ Rancangan Awal Rencana Kerja dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut yang merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

perternakan, Kesehatan hewan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut No.52 Tahun 2017.

Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup:

1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD pada tahun bersangkutan.
2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD.
3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut.
4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja SKPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari SKPD kabupaten/kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
7. Menyiapkan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala SKPD menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam

Renja SKPD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD.

8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja SKPD, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA SKPD.
9. Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dan kegiatan SKPD Provinsi yang berasal dari RPJM Provinsi dan/atau dari Renja SKPD Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya.
10. Tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota disampaikan kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/atau APBD Provinsi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2027 perlu untuk dipedomani tentang tata cara tahapan penyusunan Renja Sesuai kaidah dan ketentuan dan prosedur yang berlaku serta dasar hukum yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
5. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 s/d 2026.

11. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 000.7.3/31-Bapperida/2026 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2027.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rancangan Renja SKPD Tahun 2026 terdiri dari 5 Bab sebagai dokumen perencanaan dinas, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Lampiran



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut terkait dengan tercapai atau tidaknya pelaksanaan Sub kegiatan, kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2027.

Berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu Anggaran 2025 Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Telah melaksanakan 5 (tiga) Program yang didalamnya terdapat 15 (lima belas ) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga ) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 16.381.667.732,52,- dan Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 13.896.661.313,00 ,- dengan serapan anggaran mencapai 84,84% dan realisasi fisik mencapai 100 % Adapun program yang berkaitan dengan renstra telah mencapai hasil yang cukup maksimal dan tidak maksimal, diantaranya yaitu Hasil evaluasi sebagai wujud dari pelaksanaan rencana kerja dalam mewujudkan program dan kegiatan tahun lalu terkait dengan capaian Rencana Strategis tahun untuk tahun 2027 ternyata capaian kinerja terhadap realisasi indikator kinerja dalam rangka meningkatkan produksi perternakan sesuai hasil indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

**Tabel T. C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026**  
**Kabupaten Tanah Laut**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingka t Realis asi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2029)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11(10/4)
<b>3 27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	IKM	85 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80%	80,1 Nilai	85 Nilai	85 Nilai
<b>3 27 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>IKM</b>	85 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	80%	80,1 Nilai	85 Nilai	85 Nilai

	<b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
3 27 01 2 01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>% Capaian Perencana an, Pengangg aran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3 27 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	6 dok	6 dok	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
3 27 01 2 01 0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
3 27 01 2 02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>% Capaian Administra si Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3 27 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang/bulan	75 orang	40 orang	40 orang	40 orang	99,99 %	40 orang	40 orang	99,99%
3 27 01 2 02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Lapora n	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan

01 . 2.06 . 01	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>% Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
01 . 2.06 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket	80 Paket	40 Paket	-	-	-	-	80 Paket	80 Paket
01 . 2.06 . 02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang	20 orang	18 orang	10 orang	10 orang	100%	10 orang	20 paket	20 paket
01 . 2.06 . 05	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>% Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
01 . 2.06 . 06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
01 . 2.06 . 09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket
<b>01 . 2.08</b>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket			90.33	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	<b>Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Hewan/tanaman</b>								
2 27 02 2 02 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2 27 02 2 02	<b>Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan pereedaran benih/bibit ternak, dan hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupetan/Kota</b>	<b>% Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Benih/Bibit</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 27 02 2 02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>% Penyediaan Benih/Bibit</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari	Jumlah dosis	-	-	-	-	-	-	-	-





[illegible]

[illegible]

3 27 04 2 04 0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
3 17 07	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>%SDM Peternakan yang terlatih</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3 17 07 2 01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	% Capaian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3 17 07 2 01 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
3 17 07 2 01 0013	<b>Pertumbuhan kelembagaan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani di kecamatan/desa</b>	Jumlah Unit	-	2 unit	-	-	-	-	2 unit	2 unit
3 17 07 2 01 0008	Diseminsasi, Impormasi teknis, Sosial ekonomi dan Inovasi pertanian	Jumlah laporan		1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas dan fungsi SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Tanah Laut sesuai kebijakan teknis dan fungsi lainnya dalam mengemban amanat pekerjaan yang harus dilaksanakan secara konsisten untuk pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pertanian kedepan sesuai target Rencana Strategis Tahun 2025 s/d 2029 yaitu Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Pertanian sehingga dalam rangka pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2027 meliputi Meningkatnya hasil produksi peternakan serta optimalnya pemasaran produksi hasil peternakan.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Adapun terlihat dalam tabel TC 30 (Tabel Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah) sebagai berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian Indikator	Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah tahun				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Catatan Analisis
				2.025	2.026	2.027	2.028	2.025	2.026	2.027	2.028	
1	2	3	4	6	7		8	9	11	12	14	15
1	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	Ton	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2,04	2,04	2,04	2,04	9,98	9,90	9,90	9,90	
2	Optimalnya pemasaran	%	Persentase pemasaran produksi	53,30	53,81	54,34	54,89	99,53	99,00	99,00	99,00	

	produksi hasil peternakan		hasil peternakan								
--	---------------------------	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dimana dari tabel diatas terlihat bahwa Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan di Tahun 2027 memiliki Indikator Kerja Utama sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Hasil Perternakan** yang menjadi tolak ukur adalah hasil produksi perternakan yang dihitung dari pendapatan per Ton per Tahun berjalan.
2. **Optimalisasi Pemasaran Hasil Perternakan** yang menjadi tolak ukur adalah jumlah presentase pemasaran produksi ternak dan telur per tahun berjalan.
3. Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi tolak ukur adalah Nilai SAKIP SKPD.

## 2.2 isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya:

1. Luasnya jangkauan wilayah kerja yang meliputi 11 Kecamatan ( 135 desa dan 4 puskesmas).
2. Belum optimalisasinya pemanfaatan sumber pakan ternak melalui peningkatan kapasitas peternak, penyediaan sapras dan pelatihan manajemen pakan.
3. Pelaksanaan pelatihan teknologi pengolahan hasil ternak modern, dan membangun kemitraan dengan industri swasta, Pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak bermitra dengan swasta.
4. Masih belum optimalnya Pengawasan Lalu Lintas ternak masuk dari luar Kalimantan sehingga merupakan ancaman penyebaran penyakit menular.
5. Kurangnya minat masyarakat terhadap produksi daging local yang menyebabkan pengurangan pada pemotongan sapi di RPH
6. Kurangnya SDM bidang teknis yang melakukan pengelohan data peternakan yang akurat.

## 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari Analisa permasalahan diatas diharapkan nantinya akan mampu mengakomodir semua permasalahan yang terjadi pada Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan dan tidak lepas juga dukungan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mampu memberikan

masukan dan saran untuk kemajuan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan disajikan dalam program dan kegiatan terlihat dalam Tabel TC 32 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel T-C.32

## Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027

## Kabupaten Tanah Laut

Nama : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Catatan
1	2		3	4	5	6	8
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				20.574.478.813,22	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			IKM		14.183.500.000	
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.000.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah dokumen	6 dokumen	10.000.000	



		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah Laporan	5 laporan	10.000.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.510.000.000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah laut	Jumlah orang/bulan	45 orang	8.500.000.000	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tanah laut	Jumlah dokumen	4 dokumen	10.000.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	180.000.000	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tanah laut	Jumlah paket	80 Paket	80.000.000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanah laut	Jumlah orang	20 orang	100.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.053.500.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah laut	Jumlah paket	1 Paket	20.000.000	

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah laut	Jumlah paket	4 Paket	200.000.000	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanah laut	Jumlah paket	1 paket	25.000.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanah laut	Jumlah paket	2 Paket	30.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanah laut	Jumlah dokumen	1 dokumen	3.500.000	
		Penyediaan Bahan/Material	Tanah laut	Jumlah paket	Paket	20.000.000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah laut	Jumlah laporan	12 laporan	750.000.000	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah laut	Jumlah laporan	laporan	5.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.775.000.000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah unit	1 unit	500.000.000	

		Pengadaan Mebel	Tanah laut	Jumlah unit	20 unit	75.000.000	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	3 unit	1.600.000.000	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	4 unit	600.000.000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Capaian Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	1.150.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah laut	Jumlah laporan	12 laporan	200.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah laut	Jumlah laporan	12 laporan	950.000.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	495.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanah laut	Jumlah unit	1 unit	50.000.000	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah unit	27 unit	200.000.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	27 unit	25.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	3 unit	220.000.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.750.000.000	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		%Capaian Pemanfaatan SGG Hewan/tanaman	-	-	
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		-	-	-	
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/ kota lainnya		%Capaian Penyediaan Benih/Bibit Hewan	100%	2.750.000.000	
		Penggadaan benih ternak yang sumber dari Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	Tanah laut	Dosis	3000	750.000.000	
		Penggadaan bibit ternak yang sumber dari Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	Tanah laut	Ekor	-	1.600.000.000	

		Penggadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Kabupaten/Kota Lainnya.	Tanah laut	Ton	30	400.000.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.900.000.000	
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Tanah laut	% Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	200.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tanah laut	Jumlah Laporan	3 laporan	200.000.000	
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Tanah laut	% capaian pengawasan penggunaan sapras pertanian	100%	1.700.000.000	
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Tanah laut	Jumlah unit	3 unit	800.000.000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	2 unit	900.000.000	
2	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					1.140.000.000	

		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		% capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	990.000.000	
		Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Tanah laut	Jumlah laporan	1 Laporan	90.000.000	
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tanah laut	Jumlah laporan	1 laporan	900.000.000	
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		% penurunan angka kematian ternak	100%	60.000.000	
		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaaan HPM	Tanah laut	Jumlah laporan	1 laporan	60.000.000	
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tanah laut	% penurunan angka kematian ternak	100%	90.000.000	
		Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Tanah laut	Jumlah laporan	3 laporan	90.000.000	

	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					600.978.813	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tanah laut	% Capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	100%	600.978.813	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Tanah laut	Jumlah Unit	3 unit	400.000.000	
		Diseminasi, Impormasi, teknis sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Tanah laut	Jumlah Unit	1 Laporan	200.978.813	

Dalam hal penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang ada pada Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan adalah pada Tahun 2025 mencakup 5 program, Kegiatan 15 dan Sub kegiatan 33, pada Tahun 2026 mencakup 5 Program, 15 Kegiatan, 33 Sub kegiatan sedangkan pada tahun 2027 mencakup 5 Program 15 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan, dari sini tergambar bahwa dengan adanya program, Kegiatan dan sub kegiatan yang diampu oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan nantinya akan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan yang bertujuan meningkatkan produksi peternakan, optimalisasinya hasil pemasaran serta meningkatkan akuntabilitas Dinas perternakan dan Kesehatan Hewan.



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut terkait langsung dengan agenda peningkatan indeks pelayanan terhadap hewan Ternak dan meningkatkan produksi hewan yang ditujukan pada ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan*** sehingga Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal ketahanan ekonomi mengandung kemampuan untuk memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi sehingga terwujud kesejahteraan yang adil dan merata dari sektor perternakan.

Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan masuk pada Misi Ke 2 dari Visi Kepala Daerah yakni : Membangun Ekonomi yang Inklusif untuk penurunan kemiskinan dengan Infrastruktur yang merata dan lingkungan hidup berkualitas karena melalui pengembangan ekonomi perternakan sehingga terjaga ketahanan ekonomi nasional dengan tujuan yang akan dicapai adalah :

- a) Pertumbuhan ekonomi perternakan bisa memberikan kontribusi ekonomi yang baik kepada negara berupa kemandirian, kemajuan dan perkembangan perternakan karena bisa memberikan tambahan income bagi negara. Dengan daya kreatifitas yang tinggi dapat memutar roda perputaran perekonomian dalam menghadapi segala permasalahan di era globalisasi
- b) Mencetak generasi muda penerus bangsa yang mampu memiliki kreativitas usaha dan mengembangkan konsep wirausaha perternakan
- c) Menciptakan iklim bisnis dan investasi yang kondusif sehingga berdampak pada kekuatan dan ketahanan perekonomian .
- d) Menciptakan dampak lingkungan dan sosial masyarakat menjadi lebih baik. Menaikan pula tingkat sosial masyarakat karena semakin baiknya perekonomian maka tingkat kehidupan sosialpun akan membaik.
- e) Mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan, dengan

adanya ekonomi peternakan bisa membuka lahan peternakan

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perternakan dan Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan dalam mengampu program unggulan kepala daerah yakni berada di point 4 : Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Produktif dan di point 6 : Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Tanah Laut . Adapun sasaran yang ingin dicapai di dalam penyusunan Renja di Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2027 adalah :

1. Meningkatnya hasil produksi perternakan
2. Optimalisasi pemasaran hasil perternakan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan

Tabel 3.3 Rumusan Rencana

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	RENCANA TAHUN 2027			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
X.XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				20.574.478.813,22				19.876.735.618,69
X.XX. 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM	100%	14.183.500.000			90	13.919.000.000
X.XX.01. 201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.000.000			100	20.000.000
X.XX.01. 201.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah dokumen	6 dokumen	10.000.000	PAD	Renja murni dan renja perubahan	4 dokumen	10.000.000
X.XX.01. 201.02		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah Laporan	5 laporan	10.000.000	PAD	lapkin triwulan, lapkin semesteran, lapkin tahunan, Lakip, LKPJ	5 laporan	10.000.000
X.XX.01. 202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.510.000.000	PAD		100%	8.510.000.000
X.XX.01. 202.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah laut	Jumlah orang/bulan	45 orang	8.500.000.000	PAD	Gaji dan Tunjangan ASN DTPHor tibun	40 orang	8.500.000.000

X.XX.01. 202.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tanah laut	Jumlah dokumen	4 dokumen	10.000.000	PAD	Dok penatausahaan dan Dok Keuangan	1 dokumen	10.000.000
X.XX.01. 205		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		% Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	180.000.000	PAD		100	180.000.000
X.XX.01. 205.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tanah laut	Jumlah paket	80 Paket	80.000.000	PAD		25 orang	80.000.000
X.XX.01. 205.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanah laut	Jumlah orang	20 orang	100.000.000	PAD	Bimtek Untuk ASN	18 orang	100.000.000
X.XX.01. 206		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		% Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.053.500.000	PAD		100	1.084.000.000
X.XX.01. 206.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah laut	Jumlah paket	1 Paket	20.000.000	PAD	Pembelian peralatan Listrik & Lampu	4 Paket	25.000.000
X.XX.01. 206.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah laut	Jumlah paket	4 Paket	200.000.000	PAD		2 paket	210.000.000
X.XX.01. 206.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanah laut	Jumlah paket	1 paket	25.000.000	PAD	peralatan dan bahan pembersih	2 Paket	30.000.000
X.XX.01. 206.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanah laut	Jumlah paket	2 Paket	30.000.000	PAD	cetak dan penggandaan	1 dokumen	35.000.000
X.XX.01. 206.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanah laut	Jumlah dokumen	1 dokumen	3.500.000	PAD	koran	1 dokumen	4.000.000
X.XX.01. 206.07		Penyediaan Bahan/Material	Tanah laut	Jumlah paket	Paket	20.000.000	PAD		3 Paket	25.000.000
X.XX.01. 206.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah laut	Jumlah laporan	12 laporan	750.000.000	PAD	makmin dan perjadin	12 Laporan	750.000.000
X.XX.01. 206.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah laut	Jumlah laporan	laporan	5.000.000			1 Dokumen	5.000.000

X.XX.01.207		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>% Capaian Pengad aan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.775.000.000</b>	PAD		<b>100</b>	<b>2.375.000.000</b>
X.XX.01.207.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah unit	1 unit	500.000.000			2 unit	500.000.000
X.XX.01.207.05		Pengadaan Mebel	Tanah laut	Jumlah unit	20 unit	75.000.000	PAD		60 unit	75.000.000
X.XX.01.207.06		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	3 unit	1.600.000.000	PAD		2 unit	1.200.000.000
X.XX.01.207.09		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	4 unit	600.000.000				600.000.000
X.XX.01.208		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>% Capaian Penyedi aan Jasa Penunja ng urusan Pemerin tah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.150.000.000</b>	PAD			<b>1.230.000.000</b>
X.XX.01.208.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah laut	Jumlah laporan	12 laporan	200.000.000	PAD	PDAM, Listrik, telpon	12 laporan	230.000.000
X.XX.01.208.02		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah laut	Jumlah laporan	12 laporan	950.000.000	PAD	Gaji PTT/No n ASN	12 Laporan	1.000.000.000
X.XX.01.208.04		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>% Capaian Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>495.000.000</b>				<b>520.000.000</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanah laut	Jumlah unit	1 unit	50.000.000	PAD		unit	50.000.000

<b>X.XX.01.209</b>		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah unit	27 unit	200.000.000	PAD		unit	200.000.000
X.XX.01.209 01		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	27 unit	25.000.000	PAD		unit	30.000.000
X.XX.01.209 02		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	3 unit	220.000.000	PAD		unit	240.000.000
X.XX.01.209 06		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				<b>2.750.000.000</b>	PAD			<b>2.850.000.000</b>
X.XX.01.209 09		<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>%Capaian Pemanfaatan SGG Hewan/tanaman</b>	-	-				-
X.XX.01.209 11		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		-	-	-	PAD			-
<b>X.XX.02</b>		<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/ kota lainnya</b>		<b>%Capaian Penyediaan Benih/Bibit Hewan</b>	<b>100%</b>	<b>2.750.000.000</b>				<b>2.850.000.000</b>
		Penggadaan benih ternak yang sumber dari Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	Tanah laut	Dosis	3000	750.000.000	PAD		Dosis	750.000.000
		Penggadaan bibit ternak yang sumber dari Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	Tanah laut	Ekor	-	1.600.000.000			Ekor	1.700.000.000
<b>X.XX.02.201</b>		Penggadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Kabupaten/Kota Lainnya.	Tanah laut	Ton	30	400.000.000	PAD		Ton	400.000.000
X.XX.02.201.01		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>				<b>1.900.000.000</b>	PAD			<b>1.400.000.000</b>
X.XX.02.201.01		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Tanah laut	<b>% Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>	PAD			<b>200.000.000</b>
<b>X.XX.02.202</b>		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tanah laut	Jumlah Laporan	3 laporan	200.000.000	PAD		laporan	200.000.000

X.XX.02. 202.01		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Tanah laut	% capaian pengaw asan penggu naan sapr as pertania n	100%	1.700.000.000	PAD		1.200.000.000
X.XX.02. 202.02		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Tanah laut	Jumlah unit	3 unit	800.000.000	PAD		700.000.000
<b>X.XX.03</b>		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	2 unit	900.000.000	PAD		500.000.000
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>				1.140.000.000			1.140.000.000
		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>		% capaian Pengelo laan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuh an, dan Mikro Organis me Kewena ngan Kabupat en/Kota	100%	990.000.000			990.000.000
<b>X.XX.03.201</b>		Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Tanah laut	Jumlah laporan	1 Laporan	90.000.000	PAD	1 Laporan	90.000.000
X.XX.03. 201.01		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tanah laut	Jumlah laporan	1 laporan	900.000.000	PAD	1 laporan	900.000.000
X.XX.03. 201.02		<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>		% penurun an angka kematia n ternak	100%	60.000.000	PAD	100%	60.000.000
<b>X.XX.03.202</b>		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Tanah laut	Jumlah laporan	1 laporan	60.000.000	PAD	- 1 laporan	60.000.000
		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Tanah laut	% penurun an angka kematia n ternak	100%	90.000.000		- 100%	90.000.000
		Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Tanah laut	Jumlah laporan	3 laporan	90.000.000		- 3 laporan	90.000.000

X.XX.03. 202.03	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					600.978.813	PAD		567.735.619
X.XX.05		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tanah laut	% Capaian Pelaksa naan Penyulu h Pertania n	100%	600.978.813	PAD	100%	567.735.619
X.XX.05. 201		Penumbuhan kelembagaan kelmbagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani di kecamatan/desa	Tanah laut	Jumlah Unit	3 unit	400.000.000	PAD	3 unit	350.000.000
X.XX.05. 201.01		Diseminasi, Impormasi, teknis sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Tanah laut	Jumlah Unit	1 Laporan	200.978.813	PAD	1 Laporan	217.735.619



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam hal Rencana Kerja dan Pendanaan pada Tahun 2027, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat terlihat pada lampiran 4.1 dibawah ini :

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2027			Catatan Penting
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
X		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
X.XX		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				20.574.478.813,22		
X.XX. 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		IKM	100%	14.183.500.000		
X.XX.01.201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Capaian Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.000.000		
X.XX.01.201.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah dokumen	6 dokumen	10.000.000	PAD	Renja murni dan renja perubahan
X.XX.01.201.02		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanah laut	Jumlah Laporan	5 laporan	10.000.000	PAD	lapkin triwulan, lapkin semesteran, lapkin tahunan, Lakip, LKPJ
X.XX.01.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.510.000.000	PAD	

X.XX.01.202.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanah laut	Jumlah orang/bulan	45 orang	8.500.000.000	PAD	Gaji dan Tunjangan ASN DTPHortibun
X.XX.01.202.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tanah laut	Jumlah dokumen	4 dokumen	10.000.000	PAD	Dok penatausahaan dan Dok Keuangan
<b>X.XX.01.205</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>% Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>180.000.000</b>	PAD	
X.XX.01.205.02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tanah laut	Jumlah paket	80 Paket	80.000.000	PAD	
X.XX.01.205.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanah laut	Jumlah orang	20 orang	100.000.000	PAD	Bimtek Untuk ASN
<b>X.XX.01.206</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>% Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.053.500.000</b>	PAD	
X.XX.01.206.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tanah laut	Jumlah paket	1 Paket	20.000.000	PAD	Pembelian peralatan Listrik & Lampu
X.XX.01.206.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanah laut	Jumlah paket	4 Paket	200.000.000	PAD	
X.XX.01.206.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanah laut	Jumlah paket	1 paket	25.000.000	PAD	peralatan dan bahan pembersih

X.XX.01.206.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanah laut	Jumlah paket	2 Paket	30.000.000	PAD	cetak dan penggandaan
X.XX.01.206.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tanah laut	Jumlah dokumen	1 dokumen	3.500.000	PAD	koran
X.XX.01.206.07		Penyediaan Bahan/Material	Tanah laut	Jumlah paket	Paket	20.000.000	PAD	
X.XX.01.206.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanah laut	Jumlah laporan	12 laporan	750.000.000	PAD	makmin dan perjadi
X.XX.01.206.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tanah laut	Jumlah laporan	laporan	5.000.000		
<b>X.XX.01.207</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>% Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.775.000.000</b>	PAD	
X.XX.01.207.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah unit	1 unit	500.000.000		
X.XX.01.207.05		Pengadaan Mebel	Tanah laut	Jumlah unit	20 unit	75.000.000	PAD	Meja Rapat, Kursi Rapat untuk aula Dinas, Meja Kerja, kursi kerja
X.XX.01.207.06		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	3 unit	1.600.000.000	PAD	

X.XX.01.207.09		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	4 unit	600.000.000		
<b>X.XX.01.208</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>% Capaian Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.150.000.000</b>	PAD	
X.XX.01.208.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanah laut	Jumlah laporan	12 laporan	200.000.000	PAD	PDAM, Listrik, telpon
X.XX.01.208.02		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tanah laut	Jumlah laporan	12 laporan	950.000.000	PAD	Gaji PTT/Non ASN
X.XX.01.208.04		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>% Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>495.000.000</b>		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tanah laut	Jumlah unit	1 unit	50.000.000	PAD	
<b>X.XX.01.209</b>		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanah laut	Jumlah unit	27 unit	200.000.000	PAD	
X.XX.01.209.01		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	27 unit	25.000.000	PAD	

X.XX.01.209 02		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	3 unit	220.000.000	PAD	
X.XX.01.209 06	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>					<b>2.750.000.000</b>	PAD	
X.XX.01.209 09		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		%Capaian Pemanfaatan SGG Hewan/tanaman	-	-		
X.XX.01.209 11		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		-	-	-	PAD	
X.XX.02		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/ kota lainnya		%Capaian Penyediaan Benih/Bibit Hewan	100%	2.750.000.000		
		Penggadaan benih ternak yang sumber dari Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	Tanah laut	Dosis	3000	750.000.000	PAD	
		Penggadaan bibit ternak yang sumber dari Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	Tanah laut	Ekor	-	1.600.000.000		
X.XX.02.201		Penggadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Kabupaten/Kota Lainnya.	Tanah laut	Ton	30	400.000.000	PAD	
X.XX.02.201.01	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>					<b>1.900.000.000</b>	PAD	

X.XX.02.201.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Tanah laut	% Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	200.000.000	PAD	
X.XX.02.202		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tanah laut	Jumlah Laporan	3 laporan	200.000.000	PAD	
X.XX.02.202.01		Pembangunan Prasarana Pertanian	Tanah laut	% capaian pengawasan penggunaan sapras pertanian	100%	1.700.000.000	PAD	
X.XX.02.202.02		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Tanah laut	Jumlah unit	3 unit	800.000.000	PAD	
X.XX.03		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Tanah laut	Jumlah unit	2 unit	900.000.000	PAD	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1.140.000.000		
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		% capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	990.000.000		

<b>X.XX.03.201</b>		Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Tanah laut	Jumlah laporan	1 Laporan	90.000.000	PAD	
X.XX.03.201.01		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tanah laut	Jumlah laporan	1 laporan	900.000.000	PAD	
X.XX.03.201.02		<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>% penurunan angka kematian ternak</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	PAD	
<b>X.XX.03.202</b>		Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Tanah laut	Jumlah laporan	1 laporan	60.000.000	PAD	-
		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Tanah laut	<b>% penurunan angka kematian ternak</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>		-
		Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Tanah laut	Jumlah laporan	3 laporan	90.000.000		-
X.XX.03.202.03	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>					<b>600.978.813</b>	PAD	
<b>X.XX.05</b>		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Tanah laut	<b>% Capaian Pelaksanaan Penyuluh Pertanian</b>	<b>100%</b>	<b>600.978.813</b>	PAD	
<b>X.XX.05.201</b>		Penumbuhan kelembagaan kelmbagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani di kecamatan/desa	Tanah laut	Jumlah Unit	3 unit	400.000.000	PAD	



X.XX.05.201.01	Diseminasi, Impormasi, teknis sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Tanah laut	Jumlah Unit	1 Laporan	200.978.813	PAD	
----------------	---	------------	-------------	-----------	-------------	-----	--

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) SKPD dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, baik sebagai perangkat daerah, dengan berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Maksud Penetapan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan tahun mendatang.

Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2027 merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi Dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam proses penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Atas berkat Allah SWT, maka Rencana Kerja Tahun 2027 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah diselesaikan dan diharapkan akan terus berproses melalui yang akan menjadi salah satu bahan rancangan RKPD sampai dengan ditetapkannya RKPD tahun 2027. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut ini diharapkan

dapat dipakai sebagai acuan dalam, pelaksanaandan penilaian upaya Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja ini disusun sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut 2027 diharapkan dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila semua aparatur di lingkungan Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut bekerja dengan dedikasi dan kerja keras yang yang dijiwai, digerakkan serta dikendalikan oleh nilai-nilai agama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang merupakan motivasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan



Ir. H. Muhammad Mursyi  
NIP. 19680304 199803 1 009



